



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PARLIN ROBERT SITANGGANG**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR**
3. NHK : **140315**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.620.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 643 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 478 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 357 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KARO, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
5. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KARO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 192.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI SPD MOTOR / TRAIL Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 100.000.000****D. SURAT BERTHARGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 139.633.000****F. HARTA LAINNYA****Rp. 580.000.000****Sub Total****Rp. 2.631.633.000**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.631.633.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.